

Analisis Pemungutan Pajak Reklame Pada Fasilitas Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro

Moh. Mustoefa, S.E., M.M.

Fakultas Ekonomi-Universitas Bojonegoro

Abstrak

Salah satu Pendapatan Daerah berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah salah satunya adalah Pajak Reklame sebagai tempat untuk mempromosikan suatu usaha, baik berskala kecil ataupun besar. Berbagai jenis pajak telah diatur dalam undang-undang serta mekanisme biaya sewa sebagai pendapatan asli daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemungutan pajak reklame pada fasilitas-fasilitas umum terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bojonegoro. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Data dianalisis dengan analisa korelasi, analisa regresi linear, uji F dan uji t yang dibantu dengan menggunakan software SPSS dalam mengolah data sekunder. Hubungan Pajak reklame pada fasilitas umum terhadap Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Bojonegoro adalah lemah dengan nilai koefisien korelasi (r) positif yaitu 0,258 berarti semakin besar pemungutan pajak reklame pada fasilitas umum yang dihasilkan maka pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bojonegoro dapat juga semakin besar.

Katakunci – pajak reklame, pendapatan asli daerah, fasilitas umum.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang-undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan pembangunan nasional melalui sektor perpajakan dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan bersama. Peran serta yang tinggi dari masyarakat Indonesia dalam membayar pajak sangat diharapkan dalam membayar pajak untuk meningkatkan semua sektor pembangunan. Karena pada hakekatnya pajak yang dibayarkan masyarakat kekas negara akan dikembalikan kemasyarakat dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya agar adil dan makmur.

Salah satu Pendapatan Daerah berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah salah satunya adalah Pajak Reklame sebagai tempat untuk mempromosikan suatu usaha, baik berskala kecil ataupun besar. Ditinjau dari segi mekanisme pemungutannya, pajak atas reklame ini sebenarnya praktis dan tidak begitu banyak menuntut perhatian perangkat fiskus, khususnya dibidang administrasi pemungutannya karena objek pajak jelas, penetapan besarnya pajak didasarkan pada laporan.

Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan sumber-sumber pembiayaan guna menunjang kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah, dalam arti bahwa penyediaan dana tersebut sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh daerah dan tergantung besar kecilnya wilayah, jumlah penduduk serta makin meningkatnya kebutuhan masyarakat maka makin besar pula dana yang diperlukan dalam membiayai kegiatan pemerintah. Dengan adanya dana yang cukup, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pembangunan yang dijalankan berarti pula mampu menciptakan kesempatan kerja, kesempatan berusaha serta menciptakan sarana perekonomian lainnya untuk memperlancar roda perekonomian.

Masing-masing daerah mempunyai hak untuk menyusun rencana pembangunan yang secara komprehensif mencakup seluruh permasalahan yang telah diprioritaskan di daerah yang bersangkutan dan sumber-sumber kekayaan yang akan dikerjakan di lingkungan daerah masing-masing, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini sangat bervariasi mengingat potensi yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain.

Dalam era otonomi daerah saat ini, setiap kepala daerah harus bisa menggali potensi untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Salah satu objek adalah reklame, mulai dari baliho, billboard, dan sebagainya. Reklame adalah benda, alat-alat, atau media yang bentuk dan coraknya beragam yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan dan memujikan barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat, dibaca, dan / atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten bojonegoro nomor dua belas tahun dua ribu tentang pajak reklame, penyelenggaraan reklame meliputi reklame papan / *billboard*, reklame kain, reklame melekat / stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame kendaraan, reklame peragaan, reklame udara, reklame suara dan reklame film/ slide. Adapun yang dikecualikan dalam pengenaan pajak reklame yaitu penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan yang sejenisnya. Tujuan pemasangan reklame adalah untuk mempromosikan jasa atau produk agar masyarakat membeli atau menggunakan jasa atau produk yang ditawarkan.

Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam jenis reklame, ada yang bersifat komersil, diselenggarakan oleh partai politik, serta reklame yang ditujukan untuk pelayanan umum. Disini peneliti hanya membahas reklame yang bersifat komersil. Dalam pemasangan reklame juga dibutuhkan tempat-tempat yang sekiranya strategis, namun juga tidak bisa memasang reklame di sembarang tempat. Ada tempat-tempat yang dilarang untuk memasang reklame, seperti di jalur-jalur atau jalan-jalan utama. Pada fasilitas-fasilitas umum juga diperkenankan adanya pemasangan reklame, seperti di terminal, stasiun, halte, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemungutan pajak reklame pada fasilitas-fasilitas umum terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bojonegoro.

METODE

Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Pengumpulan data sekunder disamping dari beberapa kantor diatas juga dilakukan melalui buku-buku literature yang terkait dengan penelitian ini

seperti buku ekonomi pembangunan. Didalam pembahasan, penulis melakukan tehnik analisis data dengan menggunakan metode statistik.

Adapun rumus-rumus statistik yang digunakan adalah sebagai berikut :

a) Analisa Korelasi, suatu analisa yang digunakan untuk mengetahui hubungan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. rumus analisa korelasi sebagai berikut :

$$r = \frac{n \cdot \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{\sqrt{\sum X^2 - (\sum X)^2} \cdot \sqrt{n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2}} \quad (1)$$

b) Analisa Regresi Linear, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas/independen terhadap variabel dependen, maka dipakai analisa regresi linear metode last square dengan persamaan :

$$Y = a + bx \quad (2)$$

c) Uji t, untuk menguji hipotesa apakah setiap koefisien dari suatu variabel bebas dapat menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas tersebut terhadap variabel tak bebas cukup nyata/ signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini disajikan penerimaan pajak reklame dan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro

TABEL 1. PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN PENDAPATAN ASLI DERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2009-2013

Tahun	Pajak Reklame	Pendapatan Asli Daerah
2009	2.024.620.803	44.399.579.009
2010	2.071.803.587	47.847.657.890
2011	2.198.070.008	51.356.775.880
2012	2.088.389.327	54.243.878.623
2013	2.055.220.088	56.462.090.334

Sumber : Hasil analisa data sekunder 2013

Dari hasil penelitian ini maka dianalisa dengan menggunakan regresi linier, kemudian hasilnya dengan perhitungan SPSS seperti yang terdapat pada lampiran adalah sebagai berikut :

TABEL 3. RESUME ANALISA REGRESI LINIER PAJAK REKLAME DAN PENDAPATAN ASLI DERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2009-2013

Variabel	Koefisien Regresi	Galat Baku	Nilai t	Sig.
Pajak Reklame	18,296	40,983	0,463	0,675
Konstan = 11.351				
r ² = 0,067				
r = 0,258				

Sumber : Hasil analisa data SPSS

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS seperti pada lampiran, maka diketahui variabel (X) yaitu pajak reklame dan variabel terikatnya (Y) Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat hasil persamaan regresinya adalah :

$$y = 11.351 + 18,296 x \quad (3)$$

Dari persamaan 3 diatas ternyata tidak ada pengaruh antara keberadaan perkembangan penerimaan pajak reklame dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bojonegoro. Untuk mengetahui gambaran pengaruh dari pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bojonegoro maka masing-masing nilai X dimasukkan pada persamaan regresi, sehingga didapatkan nilai Y. Variabel terikat (Y) yaitu Pendapatan Asli Daerah, maka dapat diketahui bahwa besarnya koefisien

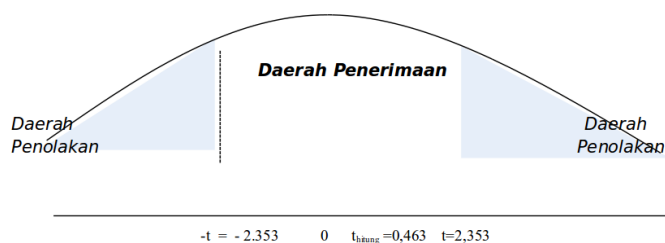
korelasinya sebesar $r = 0,258$ Korelasi $r = 0,258$ artinya adanya hubungan yang lemah antara pajak reklame dan Pendapatan Asli Daerah, bila dilihat dari nilai $r = 0,258$. Pengaruh pajak reklame dilihat dari nilai r^2 (koefisien determasi) = $(0,258)^2 \cdot 100\%$ sama dengan 6,7%, artinya 6,7% dari perubahan pendapatan Asli Daerah, bisa dijelaskan oleh keberadaan Pajak reklame sedangkan sisanya yaitu 93,3% dijelaskan oleh faktor lain.

Selanjutnya untuk menguji bahwa pajak reklame yang dinyatakan dengan variabel X mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dinyatakan dengan variabel Y diadakan pengujian hypotesa yang menggunakan t test dengan taraf nyata $\alpha = 0,05$ $n=5$ $df=n-2=3$, t tabel = 2,353 dengan ketentuan:

$H_0 : B = 0$, tidak ada pengaruh yang nyata / berarti / signifikan antara pajak reklame dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bojonegoro

$H_1 : B \neq 0$, ada pengaruh yang nyata antara pajak reklame dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan perhitungan, dapat diketahui bahwa besarnya nilai dari t_0 (t hitung) yaitu 0,465. Sedangkan $t_{tabel} = 2,353$. Berarti t_0 (t hitung) < t_{tabel} . Karena t_0 (t hitung) < t_{tabel} maka H_0 diterima atau dengan kata lain bahwa pengaruh pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak signifikan, bila digambarkan pada kurva terlihat seperti gambar 1.



Gambar 1. Kurve posisi t_0 (t hitung)

Dengan melihat hasil yang diperoleh dari analisa regresi diatas dapat diperoleh gambaran yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kabupaten Bojonegoro Seperti telah diketahui

bahwa salah satu faktor yang tidak berpengaruh signifikan pada Pendapatan Asli Daerah adalah pajak reklame.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka secara ringkas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kelebihan yang dijumpai dalam penelitian ini yaitu memiliki prosedur yang cukup mudah dalam pemungutan pajak reklame pada fasilitas umum, cepatnya pemberitahuan tentang besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak hanya dengan jangka waktu kurang dari satu minggu, sehingga wajib pajak dapat segera melakukan kewajiban perpajakannya. Mekanisme dan tata cara yang digunakan di Dinas Pendapatan Daerah cukup efektif dan efisien.
- 2) Disamping dijumpai kelebihan juga terdapat kelemahan yaitu pengetahuan dan wawasan wajib pajak mengenai pajak reklame serta kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan masih kurang, masih minimnya petugas yang melakukan penertiban dan pelayanan dalam pemasangan reklame pada fasilitas umum. Sarana dan prasarana saat ini masih kurang memadai, sehingga pelaksanaan pengawasannya sedikit terhambat. Masih adanya wajib pajak yang mendirikan reklame tanpa melakukan perizinan terlebih dahulu melalui Dipenda. Tidak dapat diketahui secara spesifik berapa jumlah penerimaan pajak reklame yang terdapat di fasilitas umum.

- 3) Hubungan Pajak reklame pada fasilitas umum terhadap Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Bojonegoro adalah lemah dengan nilai koefisien korelasi (r) positif yaitu 0,258 berarti semakin besar pemungutan pajak reklame pada fasilitas umum yang dihasilkan maka pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bojonegoro dapat juga semakin besar. Dengan mengetahui besarnya pengaruh pajak reklame pada fasilitas umum terhadap pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bojonegoro yang cukup lemah ($r^2 = 6,7\%$; $b = 18,296$) diharapkan dapat ditingkatkan lagi sehingga pada akhirnya berpengaruh secara signifikan.
- 4) Pengaruh pajak reklame pada fasilitas umum terhadap pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bojonegoro sebesar 6,7% dicerminkan oleh besarnya nilai $r^2 = 0,67$. Sedangkan sisanya 93,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model analisa seperti retribusi daerah, pendapatan lain-lain, hasil dari Perusahaan daerah atau pajak lainnya.
- 5) Besarnya pengaruh tersebut adalah tidak nyata karena berdasarkan hasil uji test diperoleh nilai bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,463 < 2,353$.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2002. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Penerbit FIA UNIBRAW dan IKIP Malang.
- Bahl, Roy., 2003. *Implementation Rules for Fiscal decentralization*. Working Paper: Georgia State University.
- Devas, Nick ; Brian Binder ; Anne Both ; dan Kenneth Davey. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Terjemahan Masri Maris. Jakarta : Penerbit UI Press.
- Gie, T Liang. 1968. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Negeri Republik Indonesia*. Jilid tiga. Jakarta.
- Halim, Abdul., (2001). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Jogjakarta: UPP AMP YKPN.
- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. 2004. *Hukum Pajak*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Ismail, M., 2002. *Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah*. Malang: FE Unibraw.
- Kuncoro, M., 2004. *Otonomi Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi ofset.
- Munawir. 1992. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit PT. Liberty.
- Rasyid, M. R. 2003. *Kebijakan Penyiapan Sumberdaya Aparatur yang Profesional dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah..* MIPI. Jakarta.
- Saad, Ilyas., 2005. *Implementasi Otonomi Daerah sudah mengarah pada Distorsi dan High Cost Economy*. Smeru, Surabaya.
- Suwandi, Early. 2000. *Hukum Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

- Taryana, 2003. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Reformasi Melalui Pelaksanaan Otonomi Daerah*). Edisi tiga, Jakarta.
- Waluyo dan Ilyas. Wirawan. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Widjaja A.W. 2004. *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia* Penerbit Cipta. Jakarta.
- World Bank, 2004 . *Decentralizing Indonesia: A Regional Public Expenditure Review Overview Report*. Report No. 26191-IND